

Komite Penasihat Terpercaya Sesi 2

Notulen Rapat

Tanggal:	6 November 2018
Waktu:	09.00 – 12.00
Tempat:	Ayana Midplaza Hotel – Jakarta
Peserta:	27 peserta

Pembukaan dan Presentasi

- Dalam sambutannya, Delegasi Uni Eropa mengingatkan bahwa studi Terpercaya dimaksudkan untuk membantu masing-masing kabupaten mengukur jalur mereka ke arah keberlanjutan, untuk mengonsolidasikan dan menyederhanakan informasi ini dengan cara meyakinkan dan menarik pelaku pasar yang bertanggung jawab, serta memastikan hal tersebut dijalankan dengan cara adil yang memberikan manfaat bagi partisipasi dan mata pencaharian petani kecil.
- Pada pertemuan tersebut, lima presentasi ditampilkan; pada awal pertemuan, pemutakhiran (update) studi "Terpercaya" termasuk: 1) presentasi mengenai buku panduan praktis tentang "Mewujudkan transisi ke produksi pertanian berkelanjutan: buku panduan praktis untuk pemerintah kabupaten di Indonesia"; dan 2) presentasi rancangan kerangka kerja untuk memilih indikator bagi kabupaten berkelanjutan "Indikator-indikator untuk melacak perkembangan menuju keberlanjutan pada tingkat kabupaten".
- Dua presentasi lain dibuat untuk menyediakan wawasan mengenai inisiatif serupa yang menggarap indikator keberlanjutan yurisdiksi di Indonesia dan untuk mengomentari indikator yang disajikan: presentasi oleh IDH tentang pendekatan "Daerah Pemasok Terverifikasi" (Verified Sourcing Area, VSA) dan presentasi oleh LTKL tentang " Mendefinisikan Sukses untuk Yurisdiksi Berkelanjutan – Patokan (*Benchmark*) dan Pendekatan: sebuah diskusi". Pada akhirnya, presentasi terakhir dibawakan oleh Global Canopy untuk melaporkan perkembangan Trase - inisiatif transparansi yang menjawab tantangan untuk memetakan seluruh rantai pasok kelapa sawit - yang berkolaborasi dengan Terpercaya.
- Tujuan presentasi mengenai Buku Panduan Praktis adalah menyoroti isi Buku Panduan yang telah dibagikan sebelumnya kepada para peserta dan metode dalam Buku Panduan tersebut yang dapat digunakan. Buku tersebut berisi panduan langkah demi langkah sederhana bagi pemerintah kabupaten dalam transisi menuju keberlanjutan dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah kabupaten dan instrumen yang tersedia dalam peraturan Indonesia. Buku Panduan juga memberikan tinjauan umum mengenai keterbatasan pemerintah kabupaten dan bagaimana mereka dapat mencoba dan mengatasi keterbatasan tersebut melalui kemitraan. Buku Panduan ini berfokus pada dua pilar keberlanjutan, yakni lingkungan dan

sosial. Versi final akan mencakup tata kelola dan pilar ekonomi. Diharapkan adanya komentar dan masukan untuk perbaikan karena Buku Panduan ini merupakan dokumen yang hidup dan bukti konsep (*proof of concept*).

- Presentasi tentang indikator mengusulkan kerangka kerja untuk seleksi indikator yang melacak perkembangan menuju keberlanjutan di tingkat kabupaten dan juga menampilkan daftar awal indikator yang memungkinkan. Penjelasan terperinci (Terpercaya Briefing nomor 2) tentang topik ini dicetak dan dibagikan kepada para peserta serta tersedia untuk penyebaran lebih luas. Indikator yang akan dipilih harus praktis. Empat kriteria indikator praktis yang diusulkan studi ini adalah: 1) sesuai mandat pemerintah kabupaten saat ini; 2) objektivitas, di mana indikator-indikator tidak bergantung pada penilaian subyektif; 3) indikator untuk data yang ada, dapat dikumpulkan dan dimutakhirkan bagi semua kabupaten, bukan hanya kabupaten percontohan; 4) berdasarkan preferensi pemangku kepentingan sehingga indikator dapat digunakan untuk penghasil (sumber) dan investasi preferensial. Kerangka kerja yang mengidentifikasi indikator menggabungkan tiga poin referensi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG), perundang-undangan Indonesia, serta Prinsip dan Kriteria (P&C) dari skema sertifikasi komoditas utama. Kesamaan dengan kontribusi ISPO terhadap TPB disorot. Empat dimensi indikator adalah sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola. Akhirnya, semua indikator diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:
 - Legalitas Dasar: Pemerintah kabupaten diwajibkan untuk menerapkan perundang-undangan terkait produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif. Jika kabupaten gagal melaksanakannya, kabupaten akan melanggar perundang-undangan nasional.
 - "Legalitas+" (terminologi ini hanya untuk sementara): Pemerintah kabupaten mematuhi perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan perencanaan tata ruang, dan telah mengadopsi peraturan daerah pendukung, alat (*tool*) atau proses untuk menjembatani kesenjangan yang teridentifikasi ke arah keberlanjutan dalam jangka pendek hingga menengah (misalnya, lima tahun). Kategori ini berkaitan dengan tindakan atau proses yang belum tentu wajib untuk dilakukan atau dirampungkan oleh kabupaten, tetapi yang didorong adalah pelaksanaan yang masih dalam kerangka hukum.
 - Keberlanjutan: Pemerintah kabupaten telah memenuhi persyaratan "Legalitas+" dan, dengan kolaborasi pelaku pasar, lembaga swadaya masyarakat, donor dan/atau insentif, mereka memenuhi standar tertinggi.
- Presentasi ketiga mengenai Daerah Penghasil Terverifikasi (Verified Sourcing Area, VSA) memberikan wawasan lebih lanjut tentang indikator yang memungkinkan. VSA berfungsi sebagai kesepakatan antara pemangku kepentingan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil (koalisi multi-pemangku kepentingan) yang mengidentifikasi target yang akan ditetapkan untuk masing-masing tema dari kelima tema Standar Kinerja Global VSA dan juga target tambahan yang penting bagi konteks lokal. Lima tema standar kinerja VSA adalah perlindungan hutan, tata kelola yang baik, tenaga kerja, penguasaan lahan, dan transparansi. Beberapa target daerah dapat mencakup produktivitas dan inklusi petani kecil, misalnya. Kesepakatan tersebut perlu mencakup satu atau lebih yurisdiksi dengan kapasitas produksi substansial dan diresmikan dalam nota kesepahaman yang mencakup setidaknya tema standar VSA dan

ditandatangani oleh koalisi multi-pihak. Kesepakatan tersebut harus memiliki sekretariat dan sumber daya. Di bawah sistem VSA tidak ada gagal atau lulus, selama mereka berkomitmen untuk memenuhi target tertentu yang mereka janjikan. Model ini telah diterapkan di Lembah Juruena di Mato Grosso untuk produksi daging sapi.

- Presentasi keempat dibawakan oleh LTKL untuk memberikan wawasan tentang indikator-indikator yang disajikan berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan pemerintah kabupaten. Beberapa masukan termasuk:
 - Bagaimana memastikan implementasi indikator di tingkat daerah? Kita perlu menemukan mekanisme pelaporan yang saat ini tersedia dan digunakan sebagai sistem pelaporan rutin pemerintah kabupaten. Jadi, ketika seseorang perlu mengetahui kinerja yurisdiksi, mereka dapat memanfaatkan sistem pelaporan.
 - Siapa yang akan memverifikasi validitas informasi yang dipresentasikan? Apakah yang memverifikasi merupakan lembaga sertifikasi?
 - Terkait pengaduan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menangani pengaduan? Pemerintah daerah tentu saja akan memiliki konflik kepentingan dalam penanganannya. Apakah komite independen diperlukan untuk menangani pengaduan atau haruskah menggunakan hubungan struktural dengan pemerintah pusat?
- Presentasi terakhir mempresentasikan perkembangan terakhir tentang Trase. Trase dan Terpercaya berkolaborasi untuk menghadirkan dimensi pasar. Peneliti Trase bekerja untuk memetakan bagian tengah rantai pasok komoditas, dari pabrik/kabupaten ke titik-titik impor di negara tujuan. Sistem Trase menggunakan rangkaian data independen yang berbeda, termasuk catatan pabeian pengiriman, data produksi, informasi tingkat aset (misalnya, pabrik, jalan, dll.) dan metrik keberlanjutan yurisdiksi untuk menghadirkan transparansi ke rantai pasok komoditas internasional. Presentasi ini menjelaskan metode yang digunakan, landasan model Trase untuk kelapa sawit Indonesia, juga menyajikan perkembangan terakhir tentang upaya pengumpulan data saat ini.

Masukan dan diskusi tentang indikator-indikator

- Pemilihan indikator harus memperhatikan distribusi wewenang antara tingkat pemerintahan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten, indikator harus dikembangkan dengan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Misalnya, semua kabupaten di bawah satu provinsi mungkin memiliki kinerja yang sama untuk pengelolaan kawasan hutan di kabupaten tersebut karena hal tersebut adalah kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, terkait TPB dan perubahan iklim, penting untuk mendefinisikan secara jelas wewenang yang didistribusikan antara tingkat pemerintahan, terutama ketika menyusun indikator.
- Dalam studi Terpercaya, ada kebutuhan untuk secara jelas membedakan tanggung jawab (yang biasanya dibagi antara banyak aktor) dengan akuntabilitas (tingkat di mana keberhasilan atau kegagalan diukur, yaitu di mana informasi harus tersedia dan dari mana insentif, positif atau negatif, dapat disebarkan ke tingkat lain). Jelas bahwa tanggung jawab atas keberlanjutan di lapangan ditanggung oleh banyak aktor pemerintah dan swasta, daerah dan pusat; hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten. Akan tetapi, setelah menyadari adanya kebutuhan praktis untuk menempatkan akuntabilitas hanya pada satu tingkat: dalam konteks ini, kabupaten dipandang sebagai unsur yang paling strategis dan penting untuk penempatan akuntabilitas dan insentif (positif dan negatif) terkait.

- Beberapa saran dibuat selama diskusi mengenai presentasi tabel indikator. Deskripsi tentang bagaimana tabel harus dibaca juga akan membantu audiens.
- Tiga klasifikasi indikator (legalitas, legalitas+ dan keberlanjutan) dianggap berguna sebagai pendekatan berlangkah (*step-wise*). Akan tetapi, konsep legalitas plus yang bahkan tidak terdapat dalam sistem pemerintahan, karena demikian untuk setiap tindakan yang diambil pemerintah, harus memiliki dasar hukum. Penggunaan istilah "legalitas plus" dapat membingungkan dan akan dikonsultasikan lebih lanjut. Ada saran, misalnya untuk menggunakan terminologi "di luar kepatuhan" bukannya "legalitas+". Komentar lain, apakah kemitraan dengan para pemangku kepentingan dapat atau juga harus terjadi dalam upaya memenuhi legalitas dasar atau legalitas plus, ketimbang hanya pada kategori keberlanjutan. Perbedaan antara "perkembangan" versus "indikator hasil" juga dibahas dalam konteks ini.
- Saat ini indikatornya terkait terutama dengan tindakan atau rencana pengelolaan yang harus dilakukan pemerintah kabupaten. Akan tetapi, penting agar tidak melupakan tujuan akhir. Untuk pengelolaan lingkungan, misalnya, tujuan akhirnya adalah kualitas tanah, udara, dan air yang baik. Dapatkah indikator menangkap tujuan akhir ini dengan merujuk pada Undang-Undang Lingkungan Hidup?
- Cara-cara verifikasi dapat diperluas. Cara verifikasi, misalnya, dapat ditambahkan seperti mata pencaharian alternatif sebagai salah satu alat verifikasi untuk kinerja mitigasi kebakaran. Komentar yang sama dibuat dengan contoh Indikator mengenai "Peningkatan Produktivitas dan Partisipasi Petani Kecil di Pasar Berkelanjutan". Sarana verifikasi untuk indikator ini adalah "basis data petani kecil akan digunakan untuk mendukung sertifikasi ISPO petani kecil". Hal ini dapat ditingkatkan dengan memasukkan produktivitas dalam cara-cara verifikasi.
- Indikator keberlanjutan mirip dengan yang sudah diterapkan perusahaan. Perbedaannya, dasar (*baseline*) dan pengukuran kinerja di setiap indikator.
- Sektor swasta tertarik karena diskusi ini mengarahkan (atau akan membutuhkan) proses penentuan prioritas (mengenai cara mendefinisikan dan mengukur keberlanjutan di tingkat kabupaten) bagi pemerintah.
- Insentif untuk kabupaten dapat datang dari sektor swasta, tetapi bisa juga berasal dari mekanisme transfer fiskal.
- Dalam pemilihan indikator, penting pula untuk mempertimbangkan bagaimana memperlakukan non-kinerja. Jadi, jika pemerintah daerah tidak memenuhi target yang dijanjikan, apa yang akan menjadi mekanisme sengketa/perselisihan dan siapa yang dapat disalahkan/dikenai sanksi atas non-kinerja?
- Bagaimana indikator dapat berkontribusi terhadap pencapaian target Indonesia untuk mengurangi emisi GRK?
- Salah satu elemen penting dari kinerja pemerintah daerah terkait kepemimpinan dan pergantian bupati. Kepemimpinan kadang-kadang menentukan seberapa progresif kabupaten tersebut. Hanya saja, hal itu sulit ditangkap oleh indikator.
- Bagaimana memastikan indikator-indikator tersebut tidak mengabaikan kabupaten/kota yang saat ini tidak memiliki kinerja tetapi membawa semua pihak menuju pencapaian target? Pengembangan indikator juga harus memastikan pemerintah daerah agar memiliki kapasitas untuk transisi menuju keberlanjutan. Kabupaten harus memiliki birokrat yang kokoh dan juga alokasi anggaran memadai pada masa transisi.
- Untuk masalah sosial, penting juga untuk mempertimbangkan fakta bahwa peraturan yang ada belum tentu dianggap adil bagi petani setempat. Saat ini sebagian besar petani hanya memiliki dua hektar lahan yang tidak cukup untuk menopang kehidupan mereka. Jadi, ketika kita merujuk sepenuhnya pada kerangka

peraturan sebagai landasan, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa beberapa peraturan mungkin tidak memberikan perlindungan yang layak bagi petani kecil.

- Perlunya memastikan keberlanjutan agar terintegrasi dalam penganggaran pemerintah daerah sehingga dana publik yang dialokasikan memadai untuk membiayai kegiatan di lapangan.

Masukan mengenai proses

- Dengan semua proses yang saat ini sedang berlangsung seperti Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan, penting untuk menjelaskan dan mensosialisasikan temuan-temuan studi Terpercaya (misalnya untuk yurisdiksi berbasis kelompok atau kabupaten di bawah ISPO yang baru?) dengan cara yang berdampak tetapi tidak mengganggu kedaulatan Indonesia.
- Kebutuhan akan waktu yang lebih banyak untuk membahas masing-masing indikator sebagai perbaikan berulang bagi setiap indikator akan diperlukan.
- Pada akhirnya, indikator akan dipilih berdasarkan pilihan politik dan konsensus. Diharapkan studi ini mampu menunjukkan secara indikatif kinerja sejumlah (10-30?) kabupaten berdasarkan data yang tersedia. Berdasarkan data, komite kemudian dapat memilih indikator dan patokan (*benchmark*) berdasarkan konsensus.

Langkah selanjutnya

- Konsultasi individu dan pertemuan tersegmentasi akan dilakukan oleh kontraktor sebelum pertemuan komite penasihat berikutnya untuk mengumpulkan umpan balik mengenai indikator secara lebih lanjut.
- Berdasarkan diskusi dengan komite dan kelompok pemangku kepentingan lainnya, indikator akan dirampingkan, mengingat ketersediaan data tertentu.
- Rapat komite penasihat berikutnya dijadwalkan pada Februari untuk meninjau daftar pilihan (*shortlist*) final. Pertemuan juga akan mencakup indikator pengujian menggunakan data riil dan verifikasi tersaring.
- Kontraktor bertujuan untuk menghasilkan laporan tentang metode operasional untuk melacak perkembangan yurisdiksi menuju keberlanjutan pada kuartal kedua 2019.

LAMPIRAN 1.

DAFTAR PESERTA PERTEMUAN TERPERCAYA

No	Name	Organisation
1	Sasmita Nugroho	Kementerian Lingkungan Hidup dan
2	Midiati Edward	INOBU
3	Ofra Shinta F	INOBU
4	Bambang A.	FAO-ID
5	Zakky Hakim	Yayasan IDH
6	Mardani	AMAN
7	Insan Syafaat	GAR
8	Christien	Kementerian Pertanian
9	Seth Van Doorn	Delegasi UE
10	Reuben Blackie	PEPSICO
11	Michael Bucki	Delegasi UE
12	Gita Syahrani	LTKL
13	Arief Wijaya	WRI
14	Edison Siagian	Kementerian Dalam Negeri
15	Riandi H	LTKL
16	Novia Widyaningtyas	Kementerian Lingkungan Hidup dan
17	Dinik Indrihastuti	Kementerian Lingkungan Hidup dan
18	Tiur Rumondang	RSPO
19	Binsar S.	KEHATI
20	M. Ichsan	KEHATI
21	Mansuetus Darto	SPKS
22	Achmad Adhitya	Unilever
23	Silvia Irawan	INOBU
24	Bernardinus Steni	INOBU
25	Sri Purwanti	INOBU
26	Thomas Sembres	EFI
27	Helen Bellfield	Global Canopy/TRASE

LAMPIRAN II

AGENDA

Waktu	Kegiatan	Pembicara/Moderator
9.00-9.10	Kata sambutan	Michael Bucki
9.20-10.00	Presentasi: Indikator untuk melacak keberlanjutan yurisdiksi: <ul style="list-style-type: none"> - Panduan praktis untuk kabupaten berkelanjutan - Pendekatan yang diusulkan dalam Terpercaya 	Silvia Irawan (INOBU) Thomas Sembres (EFI)
10.00-11.45	Pertanyaan dan jawaban <ul style="list-style-type: none"> - Wawasan dari jaringan LTKL - Wawasan dari IDH 	Bernadinus Steni (INOBU) Gita Syahrani (LTKL) Zakki Hakim (IDH)
11.45-11.55	Rehat kopi	
11.55-12.15	Presentasi: landasan dari model Trase untuk kelapa sawit Indonesia	Helen Bellfield (Trase)
12.15-13.00	Tanya Jawab	Bernadinus Steni (INOBU)
12.00-13.00	Makan Siang	

